



# RENCANA KERJA

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
TAHUN 2023



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Jalan Airlangga Nomor 56 Telp. 0370-621862 Fax. 0370-622658 Kota Pos : 1016  
<https://disnakkeswan.ntbprov.go.id> email : [disnakkeswanntb@yahoo.co.id](mailto:disnakkeswanntb@yahoo.co.id)

**RENCANA KERJA (RENJA)**  
**OPD DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**  
**TAHUN 2023**

---

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan).

Berpedoman pada RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019 – 2023, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan salah satu OPD yang mendukung Misi 5 RPJMD yaitu NTB Sejahtera dan Mandiri melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya produksi sector primer dengan indikator sasaran adalah Terwujudnya peningkatan Kontribusi PDRB Sub Sektor Peternakan dengan tujuan/sasaran yang ingin dicapai adalah Meningkatkan Produksi Ternak dan Meningkatnya Kesejahteraan Peternak dengan indikator sasaran adalah Meningkatnya Ketersedian Produksi Hasil Peternakan (Daging dan Telur) dan Meningkatnya NTP Peternakan.

Untuk mencapai tujuan/ sasaran tersebut Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terdapat 4 (empat) Program prioritas yaitu (1) Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian; (2) Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian; (3) Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (4) Program Penyuluhan Pertanian.

Dalam memantapkan pelaksanaan dan pencapaian target kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB terutama dalam

mensukseskan Pembangunan Peternakan secara komprehensif tahun 2023 perlu disusun Rencana Kerja Tahunan sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan anggaran secara komprehensif termasuk dukungan pengembangan SDM dan kelembagaan yang terkait dalam mendukung Pembangunan Peternakan secara komprehensif pada tahun 2023.

## **1.2. Landasan Hukum Penyusunan Renja**

Landasan hukum dan landasan ideal penyusunan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136)
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
  18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Pelestarian sumberdaya genetik Ternak perbibitan.
  19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pengendalian Ternak Ruminansia Perbibitan.
  20. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pemotongan Ternak Ruminansia Besar Betina Produktif
  21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 1);
  22. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 26);
  23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 114);

24. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 50 Tahun 2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 24 April 2019 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 – 2023.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Pembangunan Peternakan secara komprehensif tahun 2023 adalah memberikan panduan untuk mempermudah unsur - unsur terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan baik yang langsung maupun tidak langsung dalam mendukung pencapaian Pembangunan Peternakan menuju industrialisasi.

Tujuan penyusunan ini untuk memberikan panduan dalam :

- a. Memantapkan perencanaan pembangunan peternakan yang terpadu, *integrated* dan berorientasi pada peningkatan produksi dan produktifitas ternak melalui penetapan program dan kegiatan sesuai skala prioritas;
- b. Mengevaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan secara kontinyu sebagai bagian dasar dalam penetapan kebijakan pembangunan peternakan di Provinsi NTB;
- c. Mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan yang timbul selama dalam pelaksanaan program dan kegiatan, dukungan fiskal, kemampuan sumberdaya dan kesiapan kelembagaan teknis di lapangan;
- d. Menyiapkan dan memberikan ragam pilihan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan peternakan menuju industrialisasi dari sektor hilir hingga pengembangan sektor hulu secara terintegrasi;
- e. Sebagai pedoman pengembangan potensi peternakan secara utuh baik melalui pendekatan kawasan secara berkelanjutan sebagai basis budidaya ternak yang bernilai agribisnis dan agroindustri maupun pola intensifikasi melalui kandang - kandang kolektif.

## **Sasaran**

Sasaran Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB adalah para pemangku kebijakan pembangunan peternakan, anggota kelompok pelaku usaha perbibitan, asosiasi pengusaha ternak, akademisi dan lembaga - lembaga terkait yang mempunyai konsep dan pemahaman yang sama dalam rangka pengembangan ternak sapi potong serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang mempunyai kedulian terhadap pembangunan peternakan.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB tahun 2023 adalah sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang,
- 1.2. Landasan Hukum,
- 1.3. Maksud dan Tujuan,
- 1.4. Sistematika Penulisan.

#### **BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021 Dan Capaian Renstra,
- 2.2. Analisis Kinerja,
- 2.3. Isu-Isu Penting, Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD,
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat,

#### **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN**

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional,
- 3.2. Tujuan dan Sasaran,
- 3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2023 (Dana APBD),

#### **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

#### **BAB V. PENUTUP**

#### **LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021 Dan Capaian Renstra**

Kualitas Rencana Kerja (Renja) organisasi perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan.

Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah. Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Tahun 2023 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2021. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra tahun 2021, serta perkiraan capaian pelaksanaan renja tahun 2022 dengan berpedoman pada Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Tahun 2019-2023.

##### **a. Evaluasi Renja Tahun 2021 dan Pelaksanaan Renja Tahun 2022**

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah 2021 sampai dengan Tahun Berjalan 2022 disajikan sebagai berikut :

**Tabel : 1**

**Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Pencapaian Renstra  
Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Berjalan 2022**

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Tahun 2019-2023. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB sebagai berikut :

**Tabel 2 : Pencapaian Kinerja Sasaran dan Program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Tahun 2021**

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET RENSTRA					REALISASI RENSTRA	
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020
1	Meningkatnya Populasi dan Produksi Sub Sektor Peternakan	Prosentase Peningkatan Populasi dan Produksi Sub Sektor Peternakan	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase Penurunan Ternak Yang Terinfeksi PHMS	>1%	>1%	>1%	>1%	>1%	0,83%	0
			Program Peningkatan Produksi dan Hasil Peternakan	Pertumbuhan Populasi Ternak	5%	5%	5%	5%	5%	4,29%	0
			Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Cakupan Produksi Peternakan Yang Dipasarkan	75%	75%	75%	75%	75%	75%	0
			Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Cakupan Kelompok Ternak Yang Memanfaatkan Teknologi Peternakan	100 Klpk	100 Klpk	100 Klpk	100 Klpk	100 Klpk	100 Klpk	0

Berdasarkan table diatas Sasaran yang ingin dicapai dalam Restra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB adalah Meningkatnya Populasi dan Produksi Sub Sektor Peternakan dengan Pelaksanaan 4 (empat) Program Prioritas dengan analisis kinerja pelayanan sebagai berikut :

### a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian indikator program Persentase pertumbuhan populasi ternak (Ternak Sapi, Kerbau, Kambing dan Unggas). Hasil capaian indikator pada program ini pada tahun 2021 mencapai 2 persen sedikit lebih kecil dari target yang ditetapkan yakni 9%. atau capain kinerja adalah 22 persen (Sangat Rendah).

Bila di bandingkan antara capaian indikator program dan Capaian kinerja Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan tahun 2020 dan 2021 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3. Perbandingan Kinerja Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Tahun 2020 dan 2021

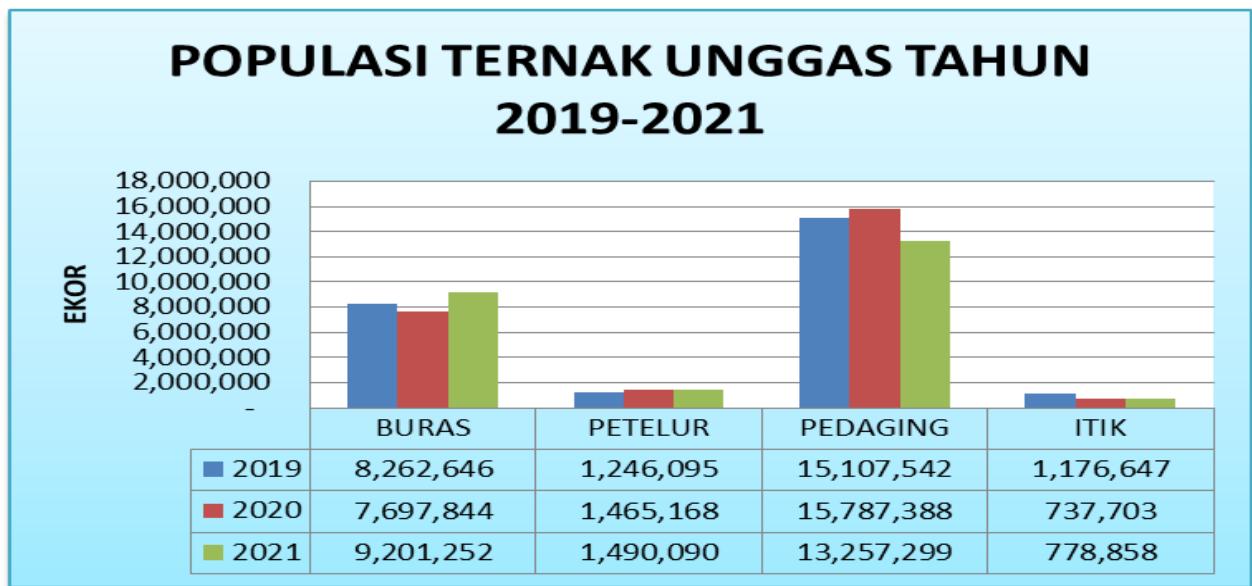
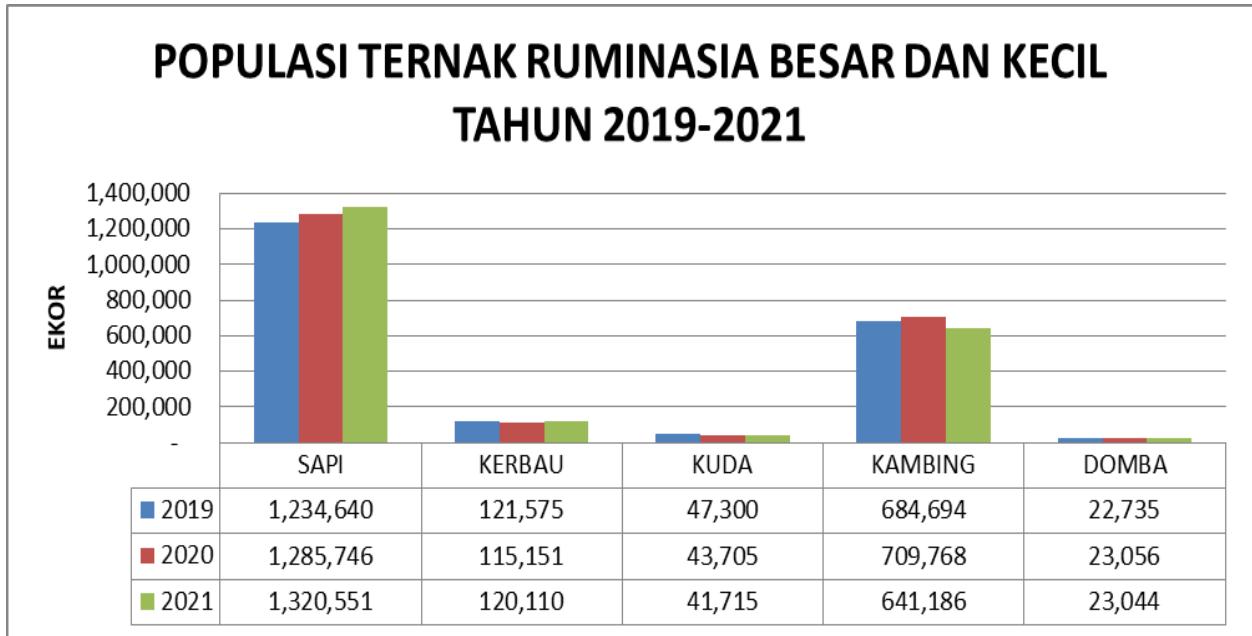
No	Program	Indikator Program	2020			2021		
			Target	Target	Target	Target	Real	Capaian
1	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Pertumbuhan Populasi Ternak	5,5 Persen	5,5 Persen	5,5 Persen	9 Persen	2 Persen	22 Persen

Berdasarkan tabel 3. bahwa hasil capaian indikator Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan sama yaitu 4,1 persen atau capaian kinernja 74,5 persen tahun 2020 karena hanya mengukur pertumbuhan populasi sapi, sementara tahun 2021 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian indikator program Persentase pertumbuhan populasi ternak (Ternak Sapi, Kerbau, Kambing dan Unggas), dimana capaian peningkatan populasi ternak sapi dapat dicapai sebesar 3 persen atau lebih rendah dari tahun 2020, hal ini dikarenakan proses pendataan populasi ternak oleh petugas di kabupaten/kota belum maksimal dilakukan karena dukungan anggaran pendataan ternak tidak tersedia.

Tahun 2021 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian teralokasi Pagu sebesar Rp. 55.547.242.300 dengan realisasi sebesar Rp.44.112.936.100 atau (74.42 persen). Capaian realisasi keuangan pada program ini masih rendah karena adanya kegiatan-kegiatan pengadaan barang/jasa yang tidak bisa terealisasi pembayarannya karena tidak tersedianya dana dari kas umum daerah atau ditunda pembayarannya di tahun 2022.

Untuk Capaian kinerja pada Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian yaitu peningkatan populasi ternak sebagai berikut :

Gambar 1 Populasi Ternak Tahun 2019-2021



Tabel 4 Target dan Realisasi Populasi Ternak Tahun 2021

KOMODITI	SATUAN	2020	2021			
			Target	r (%)	Realisasi	r (%)
Sapi	Ekor	1,285,746	1,362,891	6	1,320,551	3
Kerbau	Ekor	115,151	117,454	2	120,110	2
Kambing	Ekor	709,768	752,354	6	641,186	1
Unggas	Ekor	25,688,103	31,076,183	21	24,727,499	3
<b>% RATA-RATA PERTUMBUHAN</b>				<b>9</b>		<b>2</b>
<b>POPULASI TERNAK</b>	<b>%</b>					

Berdasarkan tabel 4. diatas capaian kinerja Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dari target output tahun 2021 yaitu peningkatan populasi sebesar 9 persen hanya terealisasi sebesar 6 persen atau sebesar 60,91 persen. capaian ini merupakan data sementara, karena untuk pertumbuhan populasi, akan dilakukan verifikasi dan validasi terlebih dahulu dengan Kabupaten/Kota, setelah kabupaten/kota melakukan verifikasi dan validasi dengan kecamatan masing-masing pada bulan Februari-Maret 2022. Hasil verifikasi dan validasi ini akan dilakukan paling lambat bulan Maret 2022.

Rincian realisasi berdasarkan kegiatan/sub kegiatan yang mendukung pencapaian target Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

- Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi.

Tahun 2021 kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi teralokasi pagu sebesar 670.370.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 544.470.000,- atau (81,22 persen). Rendahnya realisasi karena adanya kegiatan yang ditunda pembayarannya yaitu pembayaran Jasa Tenaga Pemelihara Ternak dan HMT di UPTD Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Serading untuk Bulan Desember 2021. Sedangkan untuk Output kegiatan ditargetkan jumlah ternak yang dihasilkan sebesar 75 ekor kelahiran ternak dapat tercapai sebesar 65 ekor atau sebesar 87 persen. Berdasarkan data kelahiran tersebut maka tingkat pertumbuhan populasi Sapi di UPTD Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Serading untuk tahun 2021 sebesar 72 Persen.

Sedangkan untuk Hijauan Pakan Ternak UPTD Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Serading menghasilkan produksi benih legume sebanyak 515 Kg dan telah terdistribusi sebanyak 344 kg yaitu ke Provinsi Kalimantan Timur, Riau,

Jawa Barat, Sumatra Barat, dan NTT serta 10 Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat.

2. Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi

Tahun 2021 kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi teralokasi pagu sebesar 1.003.169.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 846.458.000,- atau (84,38 persen). Rendahnya realisasi karena adanya kegiatan yang ditunda pembayarannya yaitu pembayaran Jasa Tenaga Pemelihara Ternak dan HMT di BP3TR untuk Bulan Desember 2021. Sedangkan untuk Output kegiatan ditargetkan adalah jumlah lahan Hijauan Pakan Ternak yaitu seluar 6 Ha dengan realisasi 6 Ha atau sebesar 100 persen. Lahan yang dikelolah untuk penanaman HMT selama tahun 2021 telah menghasilkan produksi HMT dari rumput odot, rumput gajah, benggala dan lainnya yang dihasilkan sebanyak 1050 Ton pertahun . Hasil produksi HMT dimanfaatkan untuk pemberian pakan ternak yang dipelihara di BP3TR yaitu ternak sapi sebanyak 57 ekor.

3. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi. Untuk kegiatan ini output yang menjadi target adalah jumlah produksi semen beku pada UPTD Balai Inseminasi Buatan sebanyak 100.000 dosis/Straw. Sedangka pagu anggaran untuk kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi adalah sebesar Rp. 993.654.500,-. Realisasi keuangan sebesar Rp. 933.301.500 (93,93 persen), sementara realisasi output kegiatan sebanyak 72.943 (72,94 persen).

Dalam kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi terdiri dari 2 sub kegiatan yakni pertama Sub Kegiatan Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang berorientasi pada produksi Semen Beku yang menjadi output kegiatan ini.

Berikut disajikan data hasil produksi semen beku pada Balai Inseminasi Buatan Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 5 Data Hasil Produksi Semen Beku Pada Balai Inseminasi Buatan Tahun 2021

No.	NAMA Bull	BULAN												Jumlah
		Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	
1	Haemsa	-	902	807	614	604	307	-	-	-	-	-	-	3,234
2	Suriad	552	1,164	1,637	1,277	1,552	1,041	-	447	987	762	1,700	1,113	12,232
3	Rider	619	1,073	1,290	1,621	1,492	849	-	298	1,013	652	1,501	1,867	12,275
4	Rintam	1,594	887	1,696	2,092	1,742	1,479	-	327	1,492	-	-	-	11,309
5	Baros	-	1,604	2,158	2,444	1,769	1,220	-	358	1,257	520	1,670	2,352	15,352
6	Summaros	172	771	1,222	1,336	1,097	752	-	204	744	475	1,175	1,354	9,302
7	Pancardin	652	650	1,296	1,297	1,104	852	-	96	802	300	879	1,211	9,139
8	Bima	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	TOTAL	3,589	7,051	10,206	10,681	9,360	6,500	-	1,730	6,295	2,709	6,925	7,897	72,943

Berdasarkan tabel 5. diatas hasil dari produksi semen beku dari Balai Inseminasi Buatan, menjadi target Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana Tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp.600.000.000 atau setara dengan 100.000 Dosis/straw yang diproduksi. Realisasi PAD pada BIB tahun 2021 sebesar Rp. 599.364.500,- atau sebanyak 99,89 persen.

Untuk Sub Kegiatan kedua yakni Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan dengan rincian belanja adalah : Jasa Sertifikasi, Kalibrasi Peralatan Laboratorium dan Pengadaan Peralatan Laboratorium. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mendukung Penjaminan Peredaran Benih/ Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan dengan cara melakukan pemeriksaan uji kualitas semen segar dan semen beku yang diproduksi.

Belanja Sertifikasi Produk Ternak (Semen Beku) Balai Inseminasi Buatan dilaksanakan dalam bentuk Pendampingan/ Pelatihan oleh Konsultan untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Balai Inseminasi Buatan sebagai salah satu prasyarat dalam pengajuan sertifikasi produk semen beku. Kegiatan ini dapat terealisasi 100 %. Pelaksanaan kegiatan Pendampingan/ Pelatihan ini

dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan 3 September 2021 bertempat di Balai Inseminasi Buatan NTB yang diikuti oleh 18 (delapan belas) orang peserta dari Balai Inseminasi Buatan. Tenaga Ahli yang menjadi narasumber pada kegiatan ini berasal dari PT. Gamma Management Consulting.

Pendampingan/ Pelatihan ini meliputi: Pengkajian Awal (*Diagnostic Assessment*), Refreshment Sistem Manajemen Mutu, Pendokumentasian Sistem Manajemen Mutu, Bimbingan Penerapan Sistem Manajemen Mutu, Refreshment Audit Internal dan Penerapannya serta Bimbingan Tinjauan Manajemen.

Dalam pelaksanaannya peserta dibekali pengetahuan untuk menyusun dokumen yang diperlukan dalam menerapkan sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015 serta tata cara melakukan audit internal. Penerapan Sistem Manajemen Mutu dan Audit Internal sangat esensial dalam proses bisnis yang dilakukan oleh Balai Inseminasi Buatan NTB untuk menghasilkan produk semen beku yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia. Output dari kegiatan Pendampingan Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 sehingga dapat menerapkannya sesuai dengan persyaratan yang ada. Kelanjutan dari kegiatan Pendampingan/ Pelatihan Penerapan Sistem Manajemen Mutu ini adalah Audit Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 oleh Lembaga auditor independent. Audit Penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001 : 2015 ini dilakukan oleh Tim Auditor dari PT. Garuda Sertifikasi Indonesia.

Tahapan audit diawali dengan pemeriksaan dokumen terkait penerapan Sistem Manajemen Mutu, kemudian pelaksanaan audit dilakukan secara daring pada tanggal 15 November 2021. Setelah melewati tahapan audit, dilakukan perbaikan atas hasil temuan audit hingga diterbitkannya Sertifikat SNI ISO 9001 : 2015 pada tanggal 26 November 2021. Sertifikat audit ini berlaku selama tiga tahun hingga tanggal 25 November 2024, surveilans akan dilakukan setiap tahun setelah penerbitan sertifikat.

Kegiatan selanjutnya adalah kalibrasi peralatan laboratorium. Kalibrasi alat rutin dilakukan setiap tahunnya sebagai salah satu persyaratan penerapan sistem manajemen mutu. Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena tidak terbitnya Surat Penyediaan Dana (SPD).

Pada Tahun 2021 terdapat pengadaan alat laboratorium berupa 1 (satu) unit mikroskop trinocular yang dilengkapi dengan kamera mikroskop dan layar monitor 24 inch. Pengadaan 1 set mikroskop ini bertujuan untuk meningkatkan performa uji

laboratorium Balai Inseminasi Buatan NTB. Target pengujian sampel pada tahun 2021 adalah 200 sampel dari 7 ekor Bull yang telah bersertifikat SNI.

Tabel 6 Realisasi pemeriksaan uji Post Thawing Motility (PTM) adalah sebagai berikut:

No	Bulan	Jumlah PTM
1	Januari	28
2	Februari	66
3	Maret	102
4	April	100
5	Mei	94
6	Juni	58
7	Juli	0
8	Agustus	14
9	September	70
10	Oktober	38
11	November	76
12	Desember	68
	<b>Total</b>	<b>714</b>

Sehingga total pemeriksaan sampel terhadap semen beku yang dirproduksi adalah 714 sampel. Sesuai dengan persyaratan pada SNI 4869-1: 2017, semen beku sapi sesudah dicairkan kembali (post thawing) pada suhu 37 °C - 38°C selama 30 detik harus memiliki motilitas spermatozoa minimum 40%. Semen beku yang dihasilkan oleh BIB NTB yang diedarkan telah melewati uji PTM dan sesuai dengan persyaratan yang ada.

4. Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor.

Untuk pengawasan peredaran obat hewan ditingkat distributor, karena mengalami refocusing anggaran, maka pelaksanaan ini didukung melalui kegiatan APBN dari target output yang dilakukan pengawasan 10 Depo/Toko obat hewan yang dilakukan pengawasan di 10 kabupaten/kota.

5. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain. Untuk kegiatan ini output yang menjadi target adalah jumlah bibit ternak yang diadakan sebanyak 1000 ekor. Sedangkan pagu anggaran untuk kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi lain adalah sebesar Rp. 58.879.488.800,-. Realisasi keuangan sebesar Rp. 41.659.826.600 (76,78 persen), sementara realisasi output kegiatan sebanyak 100 persen. Rendahnya realisasi keuangan pada kegiatan ini karena adanya kegiatan yang pembayarannya tertunda di

2022, yaitu kegiatan bantuan barang/jasa/hibah barang kepada masyarakat atau kelompok tani ternak. Data bantuan ternak baik berupa barang/jasa/uang tahun 2021.

Tabel 7 Daftar Bantuan Ternak/ Srana dan Prasarana Peternakan/ Hibah Uang Tahun 2021

NO	KAB/KOTA	HIBAH BARANG																		JUMLAH		HIBAH UANG								
		SAPI		KAMBING		AYAM		ITIK		SAPI DAN KANDANG		AYAM DAN KANDANG		KANDANG SAPI		KANDANG UNGGAS		MESIN		ALAT SARANA ABON		PAKAN		WALET						
		Jml		Jml		Jml		Jml		Jml		Jml		Jml		Jml		Jml		Jml		Jml								
		Klpk	Ekor	Klpk	Ekor	Klpk	Ekor	Klpk	Ekor	Klpk	Ekor	Klpk	Ekor	Klpk	Unit	Klpk	Unit	Klpk	unit	Klpk	kg	Klpk	Unit	Klpk	Ekor/U nit	Klpk	(Rp)	Nilai Pagu	Nilai Pencairan	
1	Kota Mataram	1	8											4											5	8	5	71,000,000	66,500,000	
2	Lombok Barat	7	61	4	56	5	7,500	18	2,700	1	5	16	9,320	3	0	4	4					1	1	59	19,647	2	49,000,000	26,000,000		
3	Lombok Utara	1	17			1	1,010					3	2,010			1	1								6	3,038	3	70,000,000	70,000,000	
4	Lombok Tengah	27	188	2	16	14	4,410	20	3,010			19	9,334			3	3					6			85	16,961	5	441,500,000	351,500,000	
5	Lombok Timur	29	233	5	71	11	4,355	71	11,300			31	15,500	1	1	1	1				1	80			149	31,461	18	745,000,000	745,000,000	
	Jumlah P. Lombok	65	507	11	143	31	17,275	109	17,010	1	5	73	36,164	4	1	9	9	0	0	0	0	7	80	1	1	304	71,115	33	1,376,500,000	1,259,000,000
6	Sumbawa Barat	7	88	1	10							6	3,000			1	1								15	3,099	2	54,500,000	26,000,000	
7	Sumbawa	12	143			3	990					22	11,000			1	1	1	1						39	12,135	19	926,000,000	926,000,000	
8	Dompul	2	27	1	27							2	1,000												5	1,054	8	76,000,000	76,000,000	
9	Bima	2	30	3	15			1	80			2	1,000												8	1,125	23	402,500,000	383,500,000	
10	Kota Bima	1	5	1	5	1	310					4	2,000												7	2,320	12	171,500,000	162,000,000	
	Jumlah P. Sumbawa	24	293	6	57	4	1,300	1	80	0	0	36	18,000	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	74	19,733	64	1,630,500,000	1,573,500,000	
	TOTAL	89	800	17	200	35	18,575	110	17,090	1	5	109	54,164	4	1	10	10	1	1	1	1	7	80	1	1	378	90,848	97	3,007,000,000	2,832,500,000

Berdasarkan tabel 7. bahwa pada tahun 2021 bantuan berupa ternak sapi dialokasikan sebanyak 90 kelompok tani, 16 kelompok kambing, 144 kelompok ayam, 110 kelompok itik dan kelompok penerima bantuan kandang baik sapi dan unggas sebanyak 14 kelompok, peralatan mesin 2 kelompok, dan kelompok pakan 7 kelompok. Untuk jumlah ternak yang terdistribusi untuk ternak ruminasia (sapi, Kambing) sebanyak 1005 ekor sedangkan untuk ternak unggas (ayam dan itik) sebanyak 89.829 ekor.

Sedangkan untuk kelompok ternak yang mendapatkan bantuan hibah uang sebanyak 97 kelompok tani ternak dengan jumlah pagu 3.007.000.000 dengan realisasi pagu sebesar 2.832.500.000,- atau 94,19 persen. Kelompok tani ternak penerima hibah uang, belanja disesuaikan dengan usulan proposal yang telah diajukan.

Tabel 8 Rekapitulasi Jenis Kegiatan Dan Jumlah Kelompok Penerima Hibah Uang Tahun 2021.

NO	KAB/KOTA	HIBAH UANG (KELOMPOK)					JUMLAH
		SAPI	KAMBING	AYAM	ITIK	KANDANG	
1	Kota Mataram	-	-	3	-	1	4
2	Lombok Barat	-	1	-	-	-	1
3	Lombok Utara	-	-	3	-	-	3
4	Lombok Tengah	2	-	1	-	1	4
5	Lombok Timur	5	-	10	2	1	18
<b>Jumlah P. Lombok</b>		<b>7</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>30</b>
6	Sumbawa Barat	-	-	1	-	-	1
7	Sumbawa	14	1	4	-	-	19
8	Dompu	-	5	3	-	-	8
9	Bima	5	10	5	1	-	21
10	Kota Bima	1	-	10	-	-	11
<b>Jumlah P. Sumbawa</b>		<b>20</b>	<b>16</b>	<b>23</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>60</b>
<b>TOTAL</b>		<b>27</b>	<b>17</b>	<b>40</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>90</b>

### b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian indikator program cakupan pengembangan wilayah sumber beras sebanyak 2 lokasi. Hasil capaian indikator pada program ini pada tahun 2021 mencapai 50 persen sedikit lebih kecil dari target yang ditetapkan yakni 100%. atau capain kinerja adalah 50 persen (Sangat Rendah).

Bila di bandingkan antara capaian indikator program dan Capaian kinerja Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan tahun 2020 dan 2021 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 9. Perbandingan Kinerja Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Tahun 2020 dan 2021

No	Program	Indikator Program	2020			2020		
			Target	Target	Target	Target	Real	Capaian
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	cakupan pengembangan wilayah sumber beras	-	-	-	100 Persen	50 Persen	50 Persen

Tahun 2021 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian teralokasi pagu sebesar Rp. 206.183.600,- dan terealisasi 205.071.600,- (99,46

persen). Adapun indikator output dari program ini yaitu cakupan pengembangan wilayah sumber bibit ternak sebanyak 2 lokasi, namun hanya terealisasi 1 lokasi, kegiatan yang mendukung program ini adalah kegiatan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. Dengan indikator output adalah pembuatan dokumen masterplan pengembangan kawasan labangkan sebagai food estate yang terintegrasi antara ternak jagung dan sapi .

Kawasan food estate ternak sapi dan jagung adalah suatu kawasan yang menerapkan sistem usaha pengembangan dengan menintegrasikan tanaman jagung dengan ternak sapi dalam suatu sistem usaha tani terpadu agar lebih menguntungkan dan menjaga kelestarian lingkungan. Luas lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan jagung dan ternak sapi seluas 11.000 Ha yang berada di 5 desa di Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa.

#### **c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**

Tujuan Pembangunan Kesehatan Hewan di Provinsi NTB untuk menjamin masyarakat terbebas dari penyakit zoonosis, menjaga dan mengamankan potensi NTB sebagai sentral ternak sapi bali nasional dengan melindungi ternak dari ancaman penyakit untuk terciptanya lingkungan budidaya yang aman, ternak yang sehat dan produktif sehingga tercapainya Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak memiliki indikator program yaitu penurunan ternak yang terinfeksi Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) yang mana target yang berhasil dapat tercapai yaitu 0,6 persen dari target kurang dari 1 persen.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB melalui Bidang Kesehatan Hewan melaksanakan program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak yang focus pada 5 jenis penyakit hewan menular strategis, yaitu penyakit Anthrax, SE, AI, Rabies dan Brucellosis.

Perbandingan Capaian kinerja Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak tahun 2020 dan 2021 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 10. Perbandingan Kinerja Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Tahun 2020 dan 2021

No	Program	Indikator Program	2020			2021		
			Target	Real	Capaian	Target	Real	Capaian
1	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Persentase penurunan ternak yang terinfeksi PHMS	<1 %	0,13 %	100 %	<1 %	0,6 %	100 %

Tujuan Pembangunan Kesehatan Hewan di Provinsi NTB untuk menjamin masyarakat terbebas dari penyakit zoonosis, menjaga dan mengamankan potensi NTB sebagai sentral ternak sapi bali nasional dengan melindungi ternak dari ancaman penyakit untuk terciptanya lingkungan budidaya yang aman, ternak yang sehat dan produktif sehingga tercapainya Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal.

Tahun 2021 Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner teralokasi pagu sebesar Rp. 740.088.094,- dan terealisasi 449.264.550,- (60,70 persen). Program ini terbagi dalam 2 fungsi yaitu fungsi kesehatan hewan tujuannya untuk pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner untuk pengawasan peredaran produk hewan yang ASUH.

Untuk target output Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, yaitu persentase penurunan ternak yang terinfeksi PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis) di bawah 1 persen. PHMS tersebut yaitu Penyakit Rabies, Antrak, Brucellosis, Avian Influenza dan Hoq Cholera), berdasarkan hasil Data Situasi kejadian penyakit ini diperoleh dari 10 kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat yang dilaporkan melalui program iSIKHNAS. Kejadian ini sebagian besar berdasarkan gejala klinis (suspect) hanya rata-rata sebesar 0,06 persen atau realisasi output 100 persen.

Sementara rendahnya realisasi keuangan yang hanya 60,70 persen, dikarenakan adanya kegiatan pada fungsi Kesehatan Masyarakat Veterinaer yaitu pada sub kegiatan pembinaan dan penerapan persyaratan teknis sertifikasi unit usaha yang tidak terealisasi kegiatannya yaitu pelatihan pengolahan usaha burung wallet di

Kabupaten Sumbawa, sementara untuk pembangunan pengolahan sarang burung wallet fisiknya dapat teralisasi 100 persen, tetapi keuangannya ditunda pembayarannya di tahun 2022. Adapun rincian masing kegiatan pada Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

1. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu pengendalian resiko dan penaggulangan penyakit hewan zoonosis, pembebasan penyakit hewan menular lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah dan penaggulangan daerah yang terdampak wabah penyakit hewan menular. Rata-rata capaian realisasi keuangan untuk sub kegiatan adalah 95,00 persen, sementara realisasi fisik dapat dicapai sebesar rata-rata 98 persen. Berikut kami sampaikan Data Situasi kejadian penyakit tahun 2021 ini diperoleh dari 10 kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat yang dilaporkan melalui program iSIKHNAS. Kejadian ini sebagian besar berdasarkan gejala klinis (suspect).
2. Berdasarkan tabel 5.6. Penyakit yang harus mendapatkan perhatian khusus adalah penyakit Rabies (RA), Anthrax (AT), Brucellosis (BRUC), Avian Influenza (AI), Hog Cholera (HC), Septichaemia Epizootica (SE), Surra (SA), Helminthiasis (Hel), dll karena masuk dalam 22 jenis Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian 4026 tahun 2013.

Tabel 11 Data Situasi Penyakit Hewan di Nusa Tenggara Barat Tahun 2021.

No	KABUPATEN/ KOTA	JENIS PENYAKIT(Jumlah Kasus)																		
		AT	SE	SA	RA	STRA	AI	ND	SCAB	HEL	HEL	MCF	BZ	THEL	COCCI	ORF	PE	DC	MYASIS	DERM
1	Mataram	-	-	-	-	-	1	-	102	65	18	-	-	-	3	-	1	5	10	3
2	Lobar	-	-	-	-	-	-	-	46	196	54	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	KLU	-	-	-	-	-	-	-	99	317	104	-	-	10	71	-	12	5	86	-
4	Loteng	-	3	1	-	-	-	-	1820	842	2.62	1.593	-	2	12	59	2	167	609	418
5	Lotim	-	-	-	-	-	-	-	3000	1898	3.677	2.209	-	1	23	394	23	503	859	627
	JUMLAH P. LOMBOK	-	3	1	-	-	1	4820	2,987	6875	3.978	-	-	45	-	25	683	-	1.208	7
6	KSB	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Sumbawa	3	71	13	406	-	-	-	156	244	289	2	57	117	38	8	6	-	55	-
8	Dompu	1	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Bima	-	53	-	17	1	-	-	735	447	104	4	3	35	-	8	135	11	9	-
10	Kota Bima	-	-	-	1	-	-	-	15	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	JUMLAH P.SUMBAWA	4	124	13	426	1	-	-	907	710	394	6	60	152	38	16	141	11	65	-
	TOTAL NIB	4	127	13	426	1	1	4.82	3.894	7.585	4.372	6	63	197	-	36	824	1.489	1208	7
	Persentase(%)	0,0002	0,006	0,032	0,118	0,023	0,00004	0,019	0,173	0,338	0,312	0,0004	0,005	0,009	0,025	0,006	0,037	0,066	0,054	0,0003

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kasus Rabies dilaporkan sebanyak 246 kasus (Kab. Sumbawa 406 kasus, Kab. Dompu 2 kasus, Kab. Bima 17 kasus dan Kota Bima 1 kasus), Anthrax 4 kasus ( Kabupaten Sumbawa 3 kasus dan Kab. Dompu 1 kasus), SE/Ngorok 127 kasus ( Kab. Sumbawa 71 kasus dan Kab. Bima 53 kasus), surra 13 kasus (Kab. Lombok Tengah 1 kasus dan Kab. Sumbawa 12 kasus), AI 1 kasus di Kota Mataram). Demikian halnya dengan Penyakit Helminthiasis (7.585 kasus) terjadi di 9 kabupaten/kota kecuali di Kab. Dompu, hal ini disebabkan karena tidak adanya laporan kasus helmintiasis melalui Ishiknas oleh Kab. Dompu. Penyakit ini tidak bisa dipandang sebelah mata (diremehkan) karena penyakit parasit ini dapat menghambat pertambahan berat badan ternak. Padahal menurut penelitian yang dilakukan oleh Siregar pada tahun 2013, kasus cacingan dapat menghambat pertumbuhan berat badan sebanyak 40% setiap harinya pada sapi potong. Pada pedet yang sudah terinfeksi secara kronis, dapat menyebabkan kematian.

Pemberian obat cacing pada pedet sangat penting, dengan harapan menekan kerugian ekonomi akibat penyakit parasit/cacing serta dapat meningkatkan produksi dan reproduktivitas ternak. Kedepannya diharapkan surveilans parasite cacing dan pengobatan parasite cacing tetap harus mendapat dukungan penuh. Serupa dengan Helminthiasi penyakit Scabiespun merupakan penyakit parasit yang perlu mendapatkan perhatian karena hampir terjadi di seluruh kabupaten/kota di NTB pada tahun 2021 dilaporkan sebanyak 3.894 kasus.

Sedangkan Hasil Pelayanan Kesehatan Hewan/Ternak di UPTD Rumah Sakit Hewan adalah 1.258 ekor yang terdiri dari Jenis Penyakit Hewan Menular (PHM) yang telah di tangani sebanyak 252 ekor dan Penyakit Hewan Non Menular berhasil ditangani adalah sebanyak 1.307ekor. Adapun Jenis Penyakit Hewan Menular (PHM) terdiri dari penyakit scabies sebanyak 110 ekor, penyakit BEF sebanyak 33 ekor, penyakit Demodex sebanyak 25 ekor, penyakit pink eye sebanyak 39 ekor, suspek penyakit Panleukopenia sebanyak 30 ekor, penyakit ektoparasit sebanyak 13 ekor dan Suspek Calici2 ekor. Penyakit Hewan Non Menular terdiri dari penyakit Myasis sebanyak 96 ekor, Penyakit Vulnus sebanyak 63ekor, penyakit Retensiplasenta sebanyak 12 ekor, penyakit Enteritis sebanyak 36 ekor,penyakit PPS sebanyak 48 ekor,penyakit Metritis sebanyak 41 ekor, penyakit Urtikaria sebanyak 2 ekor, penyakit Mal nutrisi sebanyak 7 ekor, Prolapsus ani sebanyak 2 ekor,distokia sebanyak 21 ekor,Pemberian obat cacing sebanyak 671 ekor,vaksinasi sebanyak 79 ekor,kastrasi 60 ekor dan Operasi Ovariohisterektomi sebanyak 15 ekor

3. Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan, terdiri Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit, Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan dan Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Total pagu kegiatan/sub kegiatan sebesar Rp.405.668.200 realisasi Rp.151.426.200,- atau (37,33 persen), rendahnya realisasi tersebut karena tertundanya pembayaran kegiatan pembagunan pengelohan sarang burung walet di Lombok Barat, Untuk realisasi fisik bangunan terealisasi 100 persen. dan tidak dilaksanakan Pelatihan Kelompok Pengolahan Sarang Burung Walet di Kabupaten Sumbawa.

Sub kegiatan yang mendukung tercapai output kegiatan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan program adalah

a. Sub kegiatan Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan. Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) pada Unit Usaha Pangan Asal Hewan merupakan salah satu jaminan untuk penyediaan produk pangan asala hewan yang ASUH. Sertifikasi NKV merupakan kegiatan penilaia pemenuhan persyaratan kelayakan dasar sistem jaminan keamanan pangan dalam aspek higiene-sanitasi pada unit usaha pangan asal hewan . Tujuan sertifikasi NKV adalah : Memberi jaminan dan perlindungan kepada masyarakat bahwa pangan asala hewan yang dibeli/dikonsumsi adalah Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) dan berasal dari sarana usaha yang telah memenuhi persyaratan kesmavet yang diawasi pemerintah, Mendukung terwujudnya ketenteraman batin masyarakat dan Meningkatkan daya saing produk pangan asal hewan Indonesia di pasar Internasional.

Tabel 12 Unit Usaha yang telah memiliki NKV Tahun 2021

No.	Nama Unit Usaha	Kab/Kota	Nomor NKV	Tanggal Terbit
1	CV. Ading Walet Al. Buntaran	Lombok Tengah	UCSBW 520205-001	22 april 2021
2	PT. Mitra Nasional Kualitas	Lombok Barat	CS-520114-003	28 september 2021
3	PT. Samawa Gemilang Perkasa	Sumbawa	BUP-520410-001	11 november 2021
4	CV.Agung Raya Lestari	Sumbawa	CS-520422-002	17 november 2021
5	CV.88 Aurora	Lombok Tengah	CS-520202-002	

- b. Sub kegiatan Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan terdiri dari : Melakukan Koordinasi /Sosialisasi dengan Dinas Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Sumbawa tentang kegiatan Pembuatan bangunan Sarana Prasarana Burung wallet dikabupaten Lombok Barat dan Hibah Uang untuk Bimtek pencucian sarang burung wallet di Kampung wallet Kabupaten Sumbawa, Kelompok Penerima bantuan bangunan sarana dan prasarana wallet ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Provinsi NTB Nomor : KU.188.3/5541/Disnakwan/XI/2021, Tanggal 23 November 2021, sedangkan untuk kelompok penerima bantuan hibah uang ditetapkan melalui SK Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 900-824 TAHUN 2021, tanggal 31 Desember 2021
- c. Sedangkan sub kegiatan pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan kesehatan hewan veteriner, sub kegiatan ini untuk menguji secara laboratorium terhadap sampel ternak dan produk peternakan yang dihasilkan. Ternak dan Produk yang dihasilkan harus bersstandar ASUH. Tahun 2021 melalui pemeriksaan laboratorium dan pengambilan sampel ternak. telah dilaksanakan :
- (1) pemeriksaan PUD sebanyak 227 sampel dengan hasil Negatif Surra, sebanyak 72 sampel, Negatif antrak 59 sampel, negative anaplasmosis sp sebanyak 32 sampel, Negatif babesiosis sp 32 sampel, Negatif theleriosis sp sebanyak 32 sampel.
  - (2) pemeriksaan Serum dengan rincian : 2.202 sampel yang terdiri , 21 sampel serum ayam pada pengujian ND, 21 sampel serum ayam pada pengujian Al, 2.160 sampel serum ayam pada pengujian pullorum dan 1.176 serum sapi Negatif Brucellosis.
  - (3) parasit internal sebanyak 172 sampel feces.
  - (4) Pemeriksaan residu antibiotika pada daging sapi sebanyak 26 sampel, daging ayam sebanyak 47 sampel, daging Kerbau sebayak 28 sampel, hati ayam sebayak 10 sampel dan telur ayam sebanyak 40 sampel. Hasil pengujian Residu antibiotika golongan antibiotika makrolida (ML), aminoglikosida (AG), tetrasiklin (TC).
  - (5) Selain itu juga dilakukan pemeriksaan TPC sebanyak 108 sampel daging ayam dengan hasil 47 (55.5%) sampel kurang dari BMCM (batas maksimum cemaran mikroba) dan 61 (44.4%) sampel melebihi BMCM, 128, sampel

daging Sapi dengan hasil 17 (33.3%) sampel kurang dari BMCM (batas maksimum cemaran mikroba) dan 111(66,7%) sampel melebihi BMCM, 55, sampel telur segar dengan hasil 55 (100%) sampel kurang dari BMCM (batas maksimum cemaran mikroba), dan 0 (0%) sampel melebihi BMCM, 31 sampel daging Kerbau dengan hasil 27 (100%) sampel kurang dari BMCM (batas maksimum cemaran mikroba) dan 4 (44.4%) sampel melebihi BMCM, 10 dan sampel susu kambing dengan hasil 7 (100%) sampel kurang dari BMCM (batas maksimum cemaran mikroba), dan 3 (44.4%) sampel melebihi BMCM.

- (6) Melakukan pemeriksaan dari Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner berupa : (a) Pemeriksaan Pullorum di PT Charoen Pokphand di Lombok Timur sebanyak 2.160 ekor ayam (b) Pengujian sampel dari Kabupaten Lombok Barat berupa sampel serum RBT Brucellosis sebanyak 70 sampel, hasil pengujian serum Brusellosis metode uji RBT 50 Negatif RBT, ELISA Antraks 10 sampel hasil pengujian Positif Serum Elisa Anthrak 6 hasil pengujian Negatif Serum Elisa Anthrak 4 sampel, dan SE 10 sampel sampel hasil pengujian Positif Serum Elisa SE 9, negative 1 sampel. (c) Pemeriksaan RBT Brucellosis sapi bibit lokal sebanyak : Sapi sebanyak 1.176 ekor. (d) Pengujian Sampel dari bidang keswan berupa sampel serum uji Elisa Antrak sebanyak 300 dengan hasil pengujian positif 177 sampel, negative 123 sampel. (e) Pengujian Sampel Elisa Antrak dari bidang keswan Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa sebanyak 250 sampel dengan hasil pengujian 156 sampel sero positif antrak dan 94 sampel sero negative antrak. Dan (f) Pemeriksaan TPC bidang kesmavet sebanyak 128 daging sapi, 31 Daging Kerbau, 108 daging ayam, 55 telur segar , 10 susu kambing segar , pemeriksaan E. Coli dan Coliform sebanyak 54 sampel daging sapi, 42 sampel daging kerbau, 70 sampel daging ayam 50 sampel telur segar, pemeriksaan residu antibiotika bidang kesmavet sebanyak 5 sampel daging sapi, 14 sampel daging kerbau, 16 sampel daging ayam. Pemeriksaan TPC Lombok Barat sebanyak 40 sampel daging sapi, 40 sampel daging ayam, Pemeriksaan E. Coli Lombok barat sebanyak 20 sampel telur ayam dan 23 sampel telur bebek. Pemeriksaan awal pembusukan sebanyak 20 sampel daging Ayam.

d. Kesejahteraan Hewan

Output yang diharapkan dari kegiatan kesejahteraan hewan adalah terkendalinya pemotongan betina produktif di Rumah Potong Hewan (RPH) dan Tempat Pemotongan Hewan (TPH) sebesar 1 persen dari total betina yang dipotong di RPH/TPH.

Berdasarkan Tabel 5.12 bahwa Pemotongan Sapi dan Kerbau Tahun 2021 sebanyak 64.400 Ekor, terdiri dari ternak jantan sebanyak 59.084 ekor dan ternak betina sebanyak 5.3164 ekor. Dari jumlah ternak betina yang dipotong tahun 2021 sebanyak 4.063 Ekor terdiri dari ternak sapi sebanyak 4.063 ekor dan kerbau sebanyak 1.253 Ekor, dari jumlah betina yang dipotong, betina produktif yang dipotong sebanyak 10 Ekor terdiri dari ternak sapi sebanyak 10 ekor atau 0,19 persen dari betina yang dipotong. Untuk lebih rinci dapat disajikan pada tabel 8.8. Sedangkan Realisasi anggaran sebesar Rp. 25.717.000,- atau sebesar 99,89 persen dari pagu anggaran tahun 2021 sebesar Rp. 25.748.800.

Tabel 13 Data Pemotongan Ternak Sapi dan Kerbau dan Ternak Lainnya di Provinsi NTB Tahun 2021

NO	KABUPATEN/KOTA	JLH RPH/TPH			JUMLAH PEMOTONGAN						JLH SAPI & KRB	BETINA PRODUKTIF YANG DIPOTONG			% BTN PRODUKTIF TERHADAP		ALASAN BETINA DITOLAK UNTUK DIPOTONG			
		RPH	TPH	JLH	SAPI			KERBAU				SAPI	KERBAU	JUMLAH	Yg di Potong %	BTN yg dipotong %	Umur Produktif ekor	Bunting ekor	Lain-lain ekor	
					ekor	ekor	ekor	ekor	ekor	ekor		ekor	ekor	ekor	Yg di Potong %	BTN yg dipotong %	Umur Produktif ekor	Bunting ekor	Lain-lain ekor	
1	RPH BANYUMULEK (RPH PROV.)	1	-	1	31	-	31	-	-	-	31	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	MATARAM	2	-	2	11,150	21	11,171	15	-	15	11,186	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	LOMBOK BARAT	4	3	7	3,891	-	3,891	6	-	6	3,897	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	LOMBOK UTARA	1	2	3	1,790	21	1,811	-	-	-	1,811	-	-	-	-	-	4	6	-	
5	LOMBOK TENGAH	4	9	13	7,984	127	8,111	1,752	2	1,754	9,865	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	LOMBOK TIMUR	6	16	22	19,584	45	19,629	161	-	161	19,790	1	-	1	0.01	2.22	-	-	-	
<i>Jumlah P. Lombok:</i>		<b>18</b>	<b>30</b>	<b>48</b>	<b>44,430</b>	<b>214</b>	<b>44,644</b>	<b>1,934</b>	<b>2</b>	<b>1,936</b>	<b>46,580</b>	<b>1</b>	-	<b>1</b>	<b>0.00</b>	<b>0.46</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	-	
7	SUMBAWA	7	5	12	3,539	2,261	5,800	672	919	1,591	7,391	3	-	3	0.04	0.09	-	-	-	
8	SUMBAWA BARAT	4	-	4	1,248	1,387	2,635	284	302	586	3,221	6	-	6	0.19	0.36	45	42	-	
9	DOMPU	2	1	3	1,217	72	1,289	166	19	185	1,474	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	KOTA BIMA	1	1	2	2,227	27	2,254	1	-	1	2,255	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	KAB. BIMA	3	1	4	3,242	102	3,344	124	11	135	3,479	-	-	-	0.00	-	10	12	-	
<i>Jumlah P. Sumbawa:</i>		<b>17</b>	<b>8</b>	<b>25</b>	<b>11,473</b>	<b>3,849</b>	<b>15,322</b>	<b>1,247</b>	<b>1,251</b>	<b>2,498</b>	<b>17,820</b>	<b>9</b>	-	<b>9</b>	<b>0.05</b>	<b>0.18</b>	<b>55</b>	<b>54</b>	-	
<b>JUMLAH NTB :</b>		<b>35</b>	<b>38</b>	<b>73</b>	<b>55,903</b>	<b>4,063</b>	<b>59,966</b>	<b>3,181</b>	<b>1,253</b>	<b>4,434</b>	<b>64,400</b>	<b>10</b>	-	<b>10</b>	<b>0.02</b>	<b>0.19</b>	<b>59</b>	<b>60</b>	-	

NO	KEC/RPH/TPH	REKAPITULASI PEMOTONGAN TERNAK LAINNYA														KET	
		KUDA			KAMBING			DOMBA			UNGGAS/AYAM			BABY			
		Jtn	Btn	Jlh	Jtn	Btn	Jlh	Jtn	Btn	Jlh	Jtn	Btn	Jlh	Jtn	Btn	Jlh	
1	Kota Mataram:	4	-	4	1,143	8	1,151	47	-	47	14,841	11,000	25,841	1,034	726	1,760	
2	Lombok Barat	-	-	-	2,219	-	2,219	-	-	-	158,585	-	158,585	-	-	-	
3	Lombok Utara	-	-	-	490	-	490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Lombok Tengah	448	4	452	10,026	3,054	13,080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Lombok Timur	-	-	-	1,259	-	1,259	20	-	20	-	-	-	-	-	-	
<i>Jlh. Pulau Lombok :</i>		<b>452</b>	<b>4</b>	<b>456</b>	<b>15,137</b>	<b>3,062</b>	<b>18,199</b>	<b>67</b>	<b>-</b>	<b>67</b>	<b>173,426</b>	<b>11,000</b>	<b>184,426</b>	<b>1,034</b>	<b>726</b>	<b>1,760</b>	
6	Sumbawa	22	16	38	860	-	860	22	-	22	-	-	-	-	-	-	
7	KSB	-	-	-	381	58	439	6	-	6	-	-	-	-	-	-	
8	Dompu	14	-	14	431	-	431	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Kota Bima	-	-	-	1,853	-	1,853	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Kab. Bima	124	18	142	1,406	-	1,406	33	-	33	-	-	-	-	-	-	
<i>Jlh. Pulau Sumbawa:</i>		<b>160</b>	<b>34</b>	<b>194</b>	<b>4,931</b>	<b>58</b>	<b>4,989</b>	<b>61</b>	<b>-</b>	<b>61</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Jumlah NTB:</b>		<b>612</b>	<b>38</b>	<b>650</b>	<b>20,068</b>	<b>3,120</b>	<b>23,188</b>	<b>128</b>	<b>-</b>	<b>128</b>	<b>173,426</b>	<b>11,000</b>	<b>184,426</b>	<b>1,034</b>	<b>726</b>	<b>1,760</b>	

#### d. Program Penyuluhan Pertanian

Capaian kinerja Program Penyuluhan Pertanian tahun 2020 dan 2021 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 14. Perbandingan Kinerja Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Tahun 2020 dan 2021

No	Program	Indikator Program	2020			2021		
			Target	Real	Capaian	Target	Real	Capaian
1	Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan Kelompok Ternak yang Berbasis Korporasi	100 KLMP	100 KLMP	100 %	3 KLMP Korporasi	2 KLMP Korporasi	83 %

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tahun Anggaran 2021 Program Penyuluhan Pertanian teralokasi pagu Rp. 66.313.400,- dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 57.740.00,- atau sebesar (95,19 persen). Sasaran yang dicapai dalam program ini adalah terbentuknya dan terbina kelembagaan kelompok tani berbasis korporasi dan terlaksananya informasi pemasaran produk peternakan. Tahun 2021 Jumlah Korporasi yang sudah tebentuk adalah sebanyak 2 Korporasi yaitu Korporasi KTT Ridho Ilahi di Kecamatan Wanasabah Kabupaten Lombok Timur dan

Korporasi Mandalika bareng sampi di Kecamatan Pujut Lombok Tengah. Adapun beberapa kegiatan yang mendukung program tersebut adalah :

1. Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian

Kegiatan pengembangan penerapan penyuluhan pertanian dengan sub kegiatan Diseminasi informasi teknis, social, ekonomi dan inovasi pertanian tahun anggaran 2021 semula pagu murni DPA sebesar Rp. 250.920.600,- menjadi 57.410.600,-, karena adanya rasionalisasi anggaran, Realisasi pelaksanaan kegiatan sebesar Rp. 49.265.600, atau (85,81 persen). Adanya rasionalisasi anggaran menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada dukungan anggaran seperti kegiatan pertemuan untuk bazaar/expo, pengadaan bahan cetak pendukung pameran dan expo dimana target dalam DPA adalah 10 paket produk peternakan yang dipamerkan. Namun demikian Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi dapat mengikuti kegiatan pameran dalam rangka HUT NTB dengan menampilkan produk hasil peternakan seperti produk olahan abon , kerupuk kulit, telur asin, olahan sarang burung wallet dan lain-lainnya produk hasil olahan UMKM. Kegiatan pemasaran lain yang diikuti tanpa biaya adalah kegiatan pasar lelang yang menjadi leading adalah Dinas Perdagangan. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB mengikutsertakan kalangan wirausaha di sektor peternakan seperti olahan ayam beku dan sarang burung wallet, dan terjadi transaksi perdagangan di pasar lelang dengan pihak pembeli dari Kalimantan Timur sebesar Rp. 3.000.000.000,-.

Realisasi lainnya adalah dari Belanja jasa yaitu Petugas Informasi Pasar yang bertugas menginput dan mengumpulkan data harga ternak dan hasil ternak dari seluruh kabupaten/kota se NTB secara harian melalui aplikasi SIMPONI ternak. Data dimaksud seperti data ternak sapi dalam bentuk berat hidup , harga telur (kg), harga ayam hidup (kg) baik di tingkat produsen maupun konsumen. Realisasi lainnya adalah melalui perjalanan dinas biasa yang digunakan untuk melakukan monitoring ke pasar ternak di kabupaten Lombok Timur dan identifikasi lokasi pengembangan produk ekspor sarang burung wallet di Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Barat.

Fungsi lainnya yang dilakukan oleh seksi Tata Niaga adalah memberikan pelayanan untuk menerbitkan Sertifikat Perusahaan Peternakan (SP3) dan Rekomendasi pengeluaran dan pemasukan ternak anatar kabupaten di wilayah

NTB maupun antar provinsi berdasarkan Perda Nomor 4 tahun 2020 tentang Tata Niaga Ternak dan Peraturan Gubernur nomor 38 tahun 2019 tentang pedoman pemasukan dan pengeluaran ternak di NTB. Sepanjang tahun 2021 jumlah SP3 yang diterbitkan adalah sebanyak 112 SP3 baik pengajuan baru maupun perpanjangan sedangkan data rekomendasi yang dikeluarkan didasarkan pada kuota pengeluaran ternak baik ternak potong maupun bibit dengan surat keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 524 – 195 tahun 2021 tentang Kuota Pengeluaran ternak sapi dan kerbau dalam daerah dan keluar daerah dengan rincian kuota pengeluaran untuk ternak sapi potong di dalam daerah adalah sebanyak 44.000 ekor yang terdistribusi ke kab kota di pulau Lombok dan 15.000 ekor ternak sapi potong yang dikeluarkan dari NTB untuk memenuhi kebutuhan provinsi lain seperti JABODETABEK dan beberapa provinsi lain, kuota kerbau potong sebanyak 3.450 ekor, sementara untuk ternak bibit kuota yang ditetapkan adalah sebanyak 10.000 ekor untuk keluar daerah.

2. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan. Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan yakni sub kegiatan pembentukan dan penguatan kelembagaan korporasi petani, pendampingan manajemen korporasi dan penilaian kelayakan standarisasi manajemen korporasi petani. Pagu tahun 2021 sebesar Rp. 8.902.800,-. Kegiatan ini sampai dengan desember 2021, tidak dapat direalisasikan karena tidak tersedianya SPD pada sub kegiatan tersebut. Untuk kegiatan pembinaan, pengawasan terhadap kelembagaan korporasi yang telah terbentuk yakni di korporasi KTT Ridho ilahi telah dilakukan Pertemuan Unit manajemen kawasan korporasi/UMKM dengan jumlah peserta yang mengikuti sebanyak 30 orang dilaksanakan pada tanggal 20 April 202, dan Pertemuan Unit Manajemen Kawasan Korporasi/UMKM yang dilaksanakan di Desa Pengengat Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah dengan jumlah peserta 50 orang. Data korporasi 5 Desa 1000 Desa Sapi di Kecamatan Pujut Lombok Tengah Tahun 2021 (Korporasi Mandalika Baren Sampi). Kegiatan ini di dukung dari dana APBN Tahun 2021.

### **2.3. Isu-Isu Penting, Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi**

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam melaksanakan program kegiatan tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dan solusi untuk mengatasi kendala. Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Bidang Pertanian pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2021 sebagai berikut :

#### ***Permasalahan Dan Kendala***

Dalam pelaksanakan program/kegiatan yang bersumber dari APBD tahun 2021 di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, terdapat beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi oleh satuan kerja pelaksana diantaranya:

1. Pelaksanaan kegiatan bantuan kepada masyarakat dilaksanakan diakhir tahun, sehingga bantuan kepada masyarakat belum bisa di ukur dampak keberhasilan pada tahun 2021.
2. Dukungan terhadap kegiatan pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular strategis, seperti penyakit Rabies masih minim, sehingga kasus gigitan hewan menular rabies pada manusia masih terjadi.
3. Tidak tersedianya operasional petugas Pendataan Populasi Ternak di tingkat desa/kecamatan/Kabupaten/Kota, sehingga data yang disajikan masih belum begitu akurat, dan perlu dilakukan verifikasi dan validasi secara berjenjang.
4. Kualitas ternak belum optimal karena pengunaan pejantan kurang selektif/belum diupayakan secara khusus tersedianya pejantan unggul dan pemilihan bibit sapi betina untuk induk juga belum efektf.
5. Masih rendahnya pemanfaatan teknologi inseminasi buatan dan masih terjadi kasus inbreeding sehingga berpengaruh terhadap kualitas produktivitas ternak
6. Pemanfaatan lahan (padang pengembalaan, lahan tegal, ladang, dll) dan Pemanfaatan limbah dan hasil sisa pertanian tanaman pangan (Jerami dan jagung) belum optimal, sehingga ketersediaan pakan belum kontinyu sepanjang tahun (melimpah ketika musim hujan dan kekurangan di musim kemarau).

7. Masih tingginya harga pakan ternak unggas dan masih rendahnya kemampuan pengolahan dan penyediaan pakan ternak unggas secara mandiri oleh peternak
8. Terbatasnya kemampuan dan kapasitas peternak lokal khusunya ternak unggas dalam memenuhi kebutuhan telur dalam daerah
9. Usaha peternakan (Ternak Ruminansia dan Unggas) masih dilakukan secara tradisional, belum menggunakan prinsip bisnis dan IPTEK dan belum memiliki jiwa kewirausahaan dalam mengembangkan usaha ternak.
10. Kelompok tani ternak belum berfungsi optimal, masih bersifat formalitas (membentuk kelompok hanya untuk mendapatkan bantuan pemerintah).
11. Masih tingginya kejadian penyakit gangguan reproduksi pada ternak ruminasia (Sapi dan Kerbau) yang tidak tertangani, karena keterbatasan SDM, sarana dan prasarana.
12. Masih terjadi pemotongan ternak betina produktif akibat fungsi pengendalian belum berjalan optimal, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ternak betina produktif dalam menjaga populasi.
13. Pengawasan Lalu lintas produk pangan asal ternak (daging dan telur) masih rendah. Belum adanya pos terpadu/check point di pintu masuk pelabuhan sehingga pengawasan lalin PAH tidak berjalan optimal.
14. Belum optimalnya nilai tambah pengolahan hasil peternakan karena masih minimnya Unit Usaha Prociuk Pangan Asal Hewan dan kelompok Usaha Prociuk Hasil Peternakan yang memiliki sertifikat NKV dan sertifikat ijin usaha lainnya.
15. Sistem pendampingan kelompok tani ternak masih belum dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.
16. Belum terintegrasi kegiatan dari hulu sampai hilir untuk produk peternakan yg dihasilkan yg menyebabkan nilai tambah belum optimal.

### **Saran Dan Tindak Lanjut**

1. Pelaksanaan program/kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan rencana kas yang telah dibuat, sehingga realisasi kegiatan tidak menumpuk diakhir tahun.
2. Pelaksanaan bantuan ke pada masyarakat/kelompok masyarakat dapat dilaksanakan sesuai rencana kas yang telah ditentukan, sehingga diharapkan secara administrasi dapat dipersiapkan lebih awal, dan pengadaan barang/jasa proses dipercepat.
3. Dukungan Dana Pengendalian dan pemberantasan Rabies, tidak saja berasal dari APBN tapi juga dialokasikan melalui APBD Provinsi dan APBD kabupaten/Kota.
4. Untuk biaya operasional petugas pendataan populasi ternak akan diusulkan melalui standar harga.
5. Dalam meningkatkan SDM petugas diperlukan pelatihan/ bimbingan teknis.
6. Mengembangkan industry pakan ternak, untuk memenuhi kebutuhan peternak, sehingga dapat mengurangi biaya produksi.
7. Mengembangkan padang pengembalan sebagai lahan pengembangan pakan ternak
8. Memperketat pengawasan terhadap lalulintas ternak dan produk hasil peternakan yang keluar masuk dari luar daerah provinsi maupun antar kabupaten/kota, sehingga dapat mneghindari dari penyebaran penyakit maupun dapat mengontrol peredaran produk peternakan yang sesuai standar.
9. Memperkuat kelembagaan kelompok dengan melakukan pendampingan, bimtek dan kelompok diharapkan berkembang menjadi kelompok yang ber korporasi.
10. Revitalisasi sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan dan menawarkan ke pihak investor untuk dimanfaatkan.
11. Melakukan sosialisasi terhadap pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat dari perbankan dan lembaga-lembaga perbankkan lainnya.

## 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

**Tabel 15**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021**

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3.03.02 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	2.097.136.520	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	2.113.731.520		
3.03.02 . 01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Provinsi NTB	Terselenggaranya Pelayanan Surat Menyurat	9000	58.320.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Provinsi NTB	Terselenggaranya Pelayanan Surat Menyurat	9000	38.220.000		
<b>T O T A L</b>					<b>17.629.098.300</b>					<b>17.689.140.952</b>		

## **2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2023 telah dilaksanakan Rapat Penyusunan Program dan Kegiatan dengan Kabupaten/Kota lingkup Dinas Peternakan dan kesehatan hewan, Bidang dan UPTD di lingkup OPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dari hasil pelaksanaan Rapat tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentigan, untuk diakomodir usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah. Selain itu telah terjaring beberapa aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan, baik aspirasi berupa usulan program/kegiatan DPRD Provinsi NTB, dan usulan kegiatan yang ditujukan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB oleh Masyarakat, sebagaimana rincian sebagai berikut :

1. Fasilitasi Kampung Inseminasi Buatan (IB) di Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur.
2. Peningkatan SDM Teknis Reproduksi (IB, PKB dan ATR)
3. Dukungan Penyediaan Bibit/Semen beku (Pengadaan Sapi Penjantan Unggul)
4. Dukungan Sarana dan Prasarana UPTD (BIB, BPTHMT, BP3TR dan RSH dan Lab.Veteriner)
5. Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular Strategis di 10 Kab/Kota
6. Pengembangan Kampung Unggas di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima.
7. Bantuan Bibit Ternak Sapi/Kerbau/Kambing/Unggas di 10 Kab/Kota
8. Bantuan Ternak Pejantan Unggul/ Pemacek
9. Bantuan Pabrik Pengolah Pakan/ Bank Pakan
10. Pengembangan Pakan (Lamtoro Taramba/Indigovera/dll) di kawasan pengembangan peternakan/ kelompok ternak.
11. Bantuan sarana dan prasarana kelompok usaha pengolahan hasil peternakan.
12. Dukungan saran dan prasaran pelayanan Puskeswan/RPH/TPH di Kabupaten/Kota
13. Dukungan anggaran terhadap pengumpulan data sektoral peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten/Kota

14. Dukungan peningkatan SDM Peternak dan petugas lapangan di kabupaten/kota.

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB tahun 2023 diprioritaskan dalam mendukung pencapaian Pembangunan Sub Sektor Peternakan untuk mendukung program-program prioritas yang sudah tertuang dalam dokumen RPJM dan RPJMD.

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional, pembangunan pertanian khususnya pada sektor peternakan adalah menuju Swasembada Protein Hewani. Sumber protein hewani yang dikonsumsi masyarakat kita, berasal dari keanekaragaman ternak, tidak semata-mata bersumber dari daging sapi dan kerbau. Penguatan peningkatan produksi dan reproduktivitas selain sapi dan kerbau, kita juga mendorong bertumbuh kembangnya ternak kecil seperti kambing, domba, kelinci, dan unggas.

Ketersediaan produksi daging sapi lokal tahun 2022 belum mencukupi kebutuhan nasional. Prognosa produksi daging sapi di dalam negeri tahun 2022 sebesar 490.421 ton, namun perkiraan kebutuhan daging sapi di dalam negeri 2021 sebesar 663.290 ton. Sehingga kebutuhan daging sapi baru terpenuhi 60,9% dari daging sapi di dalam negeri.

Guna memenuhi kebutuhan daging dalam negeri dan tercapainya swasembada protein hewani nasional, dilaksanakan percepatan peningkatan populasi sapi/kerbau melalui program UPSUS SIWAB (Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting) yang telah dilaksanakan sejak Tahun 2017-2019 dan tahun 2020 dilaksanakan melalui Program SIKOMANDAN (Sapi Kerbau Komunitas Andalan Negeri) yaitu gerakan optimalisasi reproduksi pada 5,8 Juta Akseptor terintegrasi dengan pengembangan Hijaun Pakan Ternak seluas 2.341 Ha, Penanganan gangguan reproduksi sebanyak 237.540 ekor dan pengendalian pemotongan betina produktif 4.000 ekor. Upaya ini dilakukan sebagai wujud komitmen pemerintah dalam mengejar swasembada daging serta mewujudkan Indonesia yang mandiri dalam pemenuhan pangan asal hewan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB dalam mendukung pelaksanaan RPJMD Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 dengan Visi Terwujudnya NTB GEMILANG, yang terdiri dari 6 Misi, dimana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berkontribusi secara khusus mendukung Misi Kelima yaitu NTB SEJAHTERA dan MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi.

Adapun Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai dalam mendukung pelaksanaan Misi tersebut adalah :

I. Tujuan :

Meningkatnya Kontribusi Pertambahan Nilai PDRB Sub Sektor Peternakan;

ii. Sasaran :

- a. Meningkatkan produksi peternakan: dengan Indikator Sasaran :  
Prosentase Peningkatan ketersediaan produksi daging dan produksi telur)
- b. Meningkatnya kesejahteraan peternak : dengan Indikator Sasaran : Peningkatan NTP Peternakan.

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Bertitik tolak dari analisis perkembangan pembangunan peternakan selama 5 tahun terakhir serta tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka indikator utama untuk mengukur capaian kinerja sub sektor peternakan dalam mendukung NTB Sejahtera dan Mandiri melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi adalah peningkatan populasi ternak dan produksi Peternakan khususnya pada 4 komiditi peternakan yaitu Ternak Sapi, Kerbau, Kambing dan Unggas serta hasil produksi peternakan daging dan telur, konsumsi pangan asal ternak, daya serap tenaga kerja, pemasaran hasil peternakan yang mengarah pada pertambahan kontribusi peternakan terhadap PDRB Provinsi NTB.

**Tabel 16**  
**Indikator Capaian Kinerja Program Sub Sektor Peternakan**  
**Tahun 2019 – 2023**

No.	Uraian	Satuan	Data 2018	Indikator Capaian Kinerja				
				2019	2020	2021	2022	2023
1.	Peningkatan Populasi Sapi	Ekor	1.183.570	1.252.911	1.315.557	1.381.335	1.450.402	1.522.922
		%	5	5	5	5	5	5
2.	Peningkatan Induk dewasa	Ekor	532.607	563.810	592.001	621.601	652.681	685.315
		%	45	45	45	45	45	45
3.	Kelahiran Pedet	Ekor	426.085	451.048	473.601	497.281	522.145	548.252
		%	80	80	80	80	80	80
4.	Penurunan kematian pedet	Ekor	42.609	45.105	47.360	49.728	52.214	54.825
		%	10	10	10	10	10	10
5.	Pemotongan dalam Daerah	Ekor	64.763	71.221	75.707	80.477	85.546	90.935
6.	Produksi Sapi Potong	Ekor	227.677	241.016	253.066	265.720	279.006	292.956
7.	Potensi Ekspor Sapi Potong	Ekor	162.916	169.795	177.359	185.243	193.460	202.021
8.	Produksi Sapi Bibit	Ekor	311.042	329.265	345.728	363.015	381.166	400.224
9.	Kebutuhan bibit	Ekor	232.944	246.591	258.921	271.867	285.460	299.733
10.	Potensi Ekspor Sapi Bibit	Ekor	78.098	82.674	86.808	91.148	95.706	100.491
11.	Serapan Tenaga Kerja	Orang	295.892	313.227	328.889	345.333	362.600	380.730

Berikut pada table 16 secara terinci dijelaskan indikator capaian kinerja pembangunan peternakan periode 2019 – 2023. Target peningkatan populasi ternak pada 5 (lima) tahun ke depan disesuaikan dengan potensi dan daya dukung sumber daya serta diarahkan dalam rangka memenuhi peningkatan pemotongan dalam daerah terutama dalam mendukung industri peternakan (olahan), disamping hal tersebut, peningkatan pertumbuhan populasi juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan ternak bibit dan potong dari daerah lain sesuai dengan kerjasama yang telah dibangun antar provinsi sehingga rencana pertumbuhan populasi ternak kedepan diharapkan akan terdapat keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan dalam daerah dan permintaan luar daerah.

**TABEL 17**  
**RUMUSAN RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021**  
**DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022**  
**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB**

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100	%	2.335.163.753	APBD	Rutin	100	%
	01. Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah pelayanan surat menyurat	Provinsi, Banyumulek dan Serading	7.000	Surat	21.069.300			7.000	Surat
<b>TOTAL DINAS PETERNAKAN DAN KESWAN</b>						<b>27.806.785.662</b>				<b>30.587.464.228</b>

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Adapun Program dan Kegiatan tahun 2023 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB sebagai beikut :

#### **1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**

##### **a Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

##### **b Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD

##### **c Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**

- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

##### **d Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**

- Perencanaan pengelolaan retribusi daerah
- Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

##### **e Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

**f Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

**g Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**h Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

**i Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan DinasOperasional/Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

## **2 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**

**a Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi**

- Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan

**b Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi**

- Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
  - Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
- c Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi**
- Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
  - Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan
  - Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak
- d Kegiatan Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor**
- Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan
  - Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan
- e Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain**
- Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
  - Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain

### **3 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**

- a Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian**
- Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan
  - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya
- b Kegiatan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**
- Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak
  - Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak

### **4 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**

- a Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**
- Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis

- Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular

**b Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi**

- Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan
- Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan
- Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi

**c Kegiatan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan**

- Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit
- Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan
- Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

**d Kegiatan Kesejahteraan Hewan**

- Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)
- Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya

**5 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**

**a Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian**

- Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian

**b Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan**

- Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani
- Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani
- Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajamen Koorporasi Petani

**Tabel 18**  
**Program dan Kegiatan tahun 2019-2020 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB**

OPD/Sub OPD	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaannya				
			2019	2020	2021	2022	2023
<b>01. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan</b>			<b>13,830,082,502</b>	<b>14,287,256,782</b>			
	<b>01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>948,442,202</b>	<b>999,122,533</b>			
	01. Penyediaan jasa surat menyurat	Terselenggaranya Pelayanan Surat Menyurat	48,550,000	52,618,000			
	02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, tersedianya sumber daya air dan listrik	77,760,000	84,276,000			
	07. Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersusunnya laporan keuangan dinas yang akuntabel	248,333,000	269,134,000			
	08. Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya peralatan dan jasa kebersihan kantor	220,370,670	220,370,670			
	10. Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK untuk kebutuhan aktivitas kantor	24,719,200	26,790,669			
	11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlsedianya dokumen dan arsip kegiatan dinas	36,000,000	39,016,000			
	12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5,829,632	6,318,000			

	15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan untuk ASN dan Mitra Kerja	29,328,000	31,785,000			
	17. Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum kegiatan	15,000,000	16,275,000			
	18. Penyelarasian Program Pemerintah Pusat dan Daerah	selarasnya Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	70,315,000	75,999,994			
	20. Penyelarasian Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Selarasnya Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	51,343,500	55,646,000			
	24. Penyediaan jasa keamanan kantor	Tersedianya Petugas Keamanan Kantor	120,893,200	120,893,200			
	<b>02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur</b>	<b>292,300,000</b>	<b>317,632,996</b>			
	03. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan	0	0			
	11. Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat	Tersedianya UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik kantor	30,000,000	37,633,000			
	22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	30,000,000	33,000,000			
	24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	221,500,000	235,000,000			
	28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	10,800,000	11,999,996			

	<b>05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>	<b>103,457,820</b>	<b>110,615,889</b>			
	04. Peningkatan mental dan fisik aparatur	Terbinanya mental dan fisik aparatur dinas	18,957,820	20,544,890			
	05. Peningkatan SDM Aparatur	Meningkatnya kompetensi ASN Dinas	36,620,000	40,071,000			
	06. Pembinaan pengendalian dan pengawasan kepegawaian	Meningkatnya disiplin ASN Dinas	47,880,000	49,999,999			
	<b>06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Nilai LKJIP OPD</b>	<b>806,432,900</b>	<b>855,203,000</b>			
	01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	176,200,000	186,000,000			
	05. Penyusunan rencana kerja SKPD	Tersusunnya rencana kerja SKPD yang efektif	242,105,900	260,000,000			
	08. Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersusunnya data statistik sektoral bidang peternakan	245,620,000	266,203,000			
	09. Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah	Tersiarinya informasi pembangunan daerah	142,507,000	143,000,000			
	<b>07. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Manajemen Aset</b>	<b>40,712,100</b>	<b>42,124,000</b>			
	01. Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Tersusunnya laporan asset yang akuntabel	40,712,100	42,124,000			

	<b>21. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak</b>	<b>Persentase Penurunan Ternak Yang Terinfeksi PHMS</b>	<b>297,968,300</b>	<b>314,188,496</b>			
	02. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	Pencegahan dan pengendalian 5 PHMS	114,191,200	123,760,000			
	11. Pelayanan kesehatan hewan dan pengawasan obat	Peningkatan reproduksi ternak dan penurunan kematian pedet	95,658,600	97,999,980			
	13. Pengamatan Penyakit Hewan	Terdeteksinya penyebaran PHMS se NTB	88,118,500	92,428,516			
	<b>22. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan</b>	<b>Pertumbuhan Populasi Ternak</b>	<b>11,243,019,180</b>	<b>11,545,298,745</b>			
	01. Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak	Terlaksananya pengembangan sarana dan prasarana produksi peternakan	709,891,300	769,380,000			
	33. Pengawasan Lalu Lintas Produk Pangan Asal Hewan	Terjaminnya Keamanan Mutu Produk Pangan Asal Hewan	139,217,494	150,884,000			
	34. Peningkatan Pengelolaan RPH	Terlaksananya Pengelolaan RPH yang ASUH	37,855,300	41,028,000			
	35. Penguatan Kelembagaan Kelompok tani Ternak	Meningkatnya SDM Peternak	2,700,800,000	2,927,000,000			
	36. Pengawasan dan Pengendalian Pemotongan Betina Produktif	Menurunnya Angka Pemotongan Betina Produktif	27,636,852	29,913,000			
	38. Peningkatan Produksi dan Produktifitas Ternak	Meningkatnya populasi ternak	7,627,618,234	7,627,093,746			

	<b>23. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan</b>	<b>Cakupan Produksi Peternakan Yang Dipasarkan</b>	<b>97,750,000</b>	<b>103,071,123</b>			
	16. Eksposisi hasil peternakan	Terpromosikan produk olahan hasil peternakan	18,350,000	19,900,000			
	17. Pembinaan dan pengolahan pemasaran hasil peternakan	Terbinanya pelaku usaha pengolahan produk peternakan	42,400,000	45,900,000			
	18. Investasi dan Pengembangan Usaha Peternakan	Meningkatnya Investasi dan Pengembangan Usaha Peternakan	37,000,000	37,271,123			
<b>02. Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Serading (BPTHMT)</b>			<b>1,382,783,200</b>	<b>1,484,165,000</b>			
	<b>01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>486,987,200</b>	<b>515,570,000</b>			
	01. Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Pengiriman Surat Menyurat	4,560,000	4,942,000			
	02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Pelayanan Jasa Komunikasi dan Listrik	48,000,000	51,522,000			
	03. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Lancarnya pelaksanaan pelayanan perkantoran	2,000,000	2,168,000			
	07. Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya pelayanan administrasi keuangan UPTD	56,606,000	61,350,000			
	08. Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya peralatan kebersihan kantor	124,256,600	124,257,000			

	10. Penyediaan alat tulis kantor	Terselenggaranya penyediaan ATK UPTD	5,978,000	6,479,000			
	11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terselenggaranya penyediaan barang cetakan	5,500,000	5,961,000			
	12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terselenggaranya komponen instalasi	3,060,000	3,316,000			
	13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terselenggaranya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	350,000	379,000			
	15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	3,720,000	4,032,000			
	17. Penyediaan makanan dan minuman	Terselenggaranya penyediaan makan minum	28,125,000	30,482,000			
	19. Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Tersedianya jasa administrasi dan teknis perkantoran	65,800,000	70,000,000			
	20. Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya kegiatan dan tersedianya dokumen	18,000,000	19,508,000			
	24. Penyediaan jasa keamanan kantor	Tersedianya fasilitas dan keamanan kantor	121,031,600	131,174,000			
	<b>02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur</b>	<b>42,365,000</b>	<b>45,915,000</b>			
	22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor	10,165,000	11,017,000			

	24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan bermotor	28,500,000	30,888,000			
	30. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	3,700,000	4,010,000			
	<b>05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>	<b>63,600,000</b>	<b>66,661,000</b>			
	04. Peningkatan mental dan fisik aparatur	Terselenggaranya pembinaan mental dan fisik	24,600,000	26,661,000			
	05. Peningkatan SDM Aparatur	Terselenggaranya peningkatan SDM	39,000,000	40,000,000			
	<b>06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Nilai LKJIP OPD</b>	<b>89,455,000</b>	<b>96,952,000</b>			
	01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya dokumen RKAP/DPAP 2019 dan laporan capaian kinerja	75,880,000	82,239,000			
	09. Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah	Terlaksananya penyebaran informasi pembangunan	13,575,000	14,713,000			
	<b>07. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Manajemen Aset</b>	<b>16,365,000</b>	<b>17,736,000</b>			
	01. Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Tersedianya dokumen asset UPTD	16,365,000	17,736,000			
	<b>22. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan</b>	<b>Pertumbuhan Populasi Ternak</b>	<b>684,011,000</b>	<b>741,331,000</b>			

	26. Pembibitan hijauan makanan ternak Serading	Terlaksananya pengembangan hijauan	110,030,000	119,251,000			
	27. Pembibitan ternak sapi bali Serading	Terlaksananya pengembangan ternak bibit	292,093,000	316,570,000			
	39. Pengembangan Pakan Lokal	Tersedianya pakan lokal yang berkualitas	39,170,000	42,452,000			
	40. Peningkatan peran dan fungsi Balai Pembibitan Ternak dan HMT Serading	Terlaksananya peran dan fungsi UPTD	15,000,000	16,257,000			
	41. Pengembangan instalasi perbibit ternak pekat Dompu	Terlaksananya pengembangan perbibit	106,075,000	114,964,000			
	42. Pengembangan instalasi perbibit hijauan makanan ternak Pandai	Terlaksananya pengembangan HPT di Pandai Bima	121,643,000	131,837,000			
<b>03. Balai Inseminasi Buatan (BIB)</b>			<b>1,352,779,280</b>	<b>1,374,998,451</b>			
	<b>01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>341,457,280</b>	<b>347,002,800</b>			
	01. Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya kebutuhan pelayanan surat menyurat	1,650,000	1,788,000			
	02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya kebutuhan jasa listrik, air dan telpon	42,000,000	45,520,000			
	03. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5,000,000	5,419,000			

	07. Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan	27,527,500	29,834,000			
	08. Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Peralatan dan Petugas Jasa Kebersihan	98,667,280	98,667,000			
	10. Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	5,911,900	6,407,010			
	11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Bahan Informasi Pelayanan UPTD	4,000,000	4,000,000			
	12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Alat Listrik Bagi Kebutuhan Kantor	3,344,000	3,344,000			
	15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang	Tersedianya Bahan Bacaan Aparatur	3,000,000	3,000,000			
	17. Penyediaan makanan dan minuman	Tersediannya makan dan minum apratur dan tamu	7,500,000	7,500,000			
	20. Penyelarasian Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terkoordinasinya kegiatan Provinsi dengan Kabupaten/Kota	20,000,000	18,667,190			
	24. Penyediaan jasa keamanan kantor	Tersedianya petugas keamanan kantor UPTD	122,856,600	122,856,600			
	<b>02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur</b>	<b>39,700,000</b>	<b>29,997,461</b>			
	11. Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat	Tersedianya peralatan komputer dan elektronik	9,000,000	12,997,461			

	24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kebutuhan dan operasional pemeliharaan kendaraan dinas	21,700,000	5,000,000			
	30. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya kebutuhan pemeliharaan rutin peralatan dan perlengkapan kantor	9,000,000	12,000,000			
	<b>05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>	<b>22,650,000</b>	<b>23,248,238</b>			
	04. Peningkatan mental dan fisik aparatur	Terbinanya mental fisik aparatur terutama nilai - nilai keagamaan	7,650,000	7,650,000			
	05. Peningkatan SDM Aparatur	Terlaksananya peningkatan SDM Aparatur bidang peternakan	15,000,000	15,598,238			
	<b>06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Nilai LKJIP OPD</b>	<b>30,025,000</b>	<b>22,788,952</b>			
	01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan tahunan dan DPA UPTD	25,125,000	16,788,952			
	09. Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah	Tersedianya bahan penyebarluasan informasi fungsi UPTD	4,900,000	6,000,000			
	<b>07. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Manajemen Aset</b>	<b>19,138,000</b>	<b>20,961,000</b>			
	01. Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Tersedianya Dokumen Asset UPTD	19,138,000	20,961,000			
	<b>22. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan</b>	<b>Pertumbuhan Populasi Ternak</b>	<b>899,809,000</b>	<b>931,000,000</b>			

	10. Pembuatan mani beku	Terlaksananya pembuatan straw/ mani beku inseminasi buatan	199,370,000	216,000,000			
	12. Pembibitan & perawatan ternak sapi Brangus di Instalasi Amor	Terpeliharanya ternak sapi berangus amor – amor	27,180,000	30,000,000			
	13. Peningkatan peran dan fungsi Balai Inseminasi Buatan (BIB)	Tersedianya Lab IB yang sesuai standar ISO/SNI	470,150,000	475,000,000			
	25. Pengujian dan Pengawasan Mutu Semen Beku	Terlaksananya pengujian straw / mani beku pejantan BULL	72,159,000	75,000,000			
	39. Pengembangan Pakan Lokal	Tersedianya HMT pakan ternak yang berkwalitas	130,950,000	135,000,000			
<b>04. Balai Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner (BRSHLV)</b>			<b>513,972,168</b>	<b>555,903,000</b>			
	<b>01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>192,650,868</b>	<b>208,796,000</b>			
	01. Penyediaan jasa surat menyurat	terlaksananya kegiatan surat menyurat	2,000,000	2,168,000			
	02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pelayanan komunikasi, listrik dan air	42,600,000	46,170,000			
	03. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya Penyediaan peralatan dan perlengkapan	13,000,000	14,089,000			
	07. Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pembayaran pelaksanaan kegiatan	24,980,500	27,074,000			

	08. Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya jasa kebersihan kantor	73,941,510	80,138,000			
	10. Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis menulis	2,801,400	3,036,000			
	11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersediannya barang cetak dan penggandaan	2,000,000	2,168,000			
	12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik dan penerangan	2,226,138	2,413,000			
	15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	1,200,000	1,301,000			
	17. Penyediaan makanan dan minuman	Tersediannya makanan dan minuman untuk kebutuhan	3,750,000	4,064,000			
	24. Penyediaan jasa keamanan kantor	Tersedianya jasa keamanan kantor	24,151,320	26,175,000			
	<b>02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur</b>	<b>19,450,000</b>	<b>20,780,000</b>			
	22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	3,100,000	3,360,000			
	24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	10,350,000	11,217,000			
	30. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan dan perlengkapan kantor	6,000,000	6,203,000			

	<b>05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>	<b>18,100,000</b>	<b>18,776,000</b>			
	04. Peningkatan mental dan fisik aparatur	Terlaksananya peningkatan mental dan fsik ASN	2,100,000	2,276,000			
	05. Peningkatan SDM Aparatur	Tersedianya kegiatan peningkatan SDM aparatur	16,000,000	16,500,000			
	<b>06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Nilai LKJIP OPD</b>	<b>14,775,000</b>	<b>16,013,000</b>			
	01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan RKAP/DPPA 2019 dan RKA	11,775,000	12,762,000			
	09. Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah	Tersedianya informasi pembangunan UPTD	3,000,000	3,251,000			
	<b>07. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Manajemen Aset</b>	<b>18,274,900</b>	<b>19,806,000</b>			
	01. Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Teridentifikasi dan terverifikasinya aset UPTD	18,274,900	19,806,000			
	<b>22. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan</b>	<b>Pertumbuhan Populasi Ternak</b>	<b>250,721,400</b>	<b>271,732,000</b>			
	14. Peningkatan peran dan fungsi Balai Laboratorium Veteriner dan RSH	Terlaksananya pengembangan dan peran fungsi balai	44,000,000	47,687,000			
	16. Peningkatan pelayanan laboratorium kesehatan hewan type B	Terlaksananya pelayanan laboratorium veteriner	138,655,500	150,275,000			

	17. Peningkatan pelayanan Rumah Sakit Hewan	Terlaksananya pelayanan Rumah Sakit Hewan	68,065,900	73,770,000			
<b>05. Balai Pengembangan dan Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia</b>			<b>708,060,960</b>	<b>1,053,645,665</b>			
	<b>01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>127,598,960</b>	<b>140,805,000</b>			
	01. Penyediaan jasa surat menyurat	terselenggaranya pelayanan surat menyurat	1,560,000	2,063,000			
	02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Pelayanan komunikasi, Listrik dan Air	6,000,000	6,494,000			
	03. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Belanja Pemeliharaan	5,900,000	7,957,000			
	07. Penyediaan jasa administrasi keuangan	terlaksananya pembayaran pelaksanaan kegiatan	24,550,000	28,696,000			
	08. Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya kebersihan kantor	49,475,140	49,717,000			
	10. Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Pelayanan UPTD	2,887,500	3,139,000			
	11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Pencetakan dan Penggandaan	3,000,000	3,207,000			
	12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat listrik bagi kebutuhan kantor BP3TR	2,475,000	3,104,000			

	13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya kegiatan perlengkapan gedung kantor	7,500,000	9,532,000			
	24. Penyediaan jasa keamanan kantor	Tersedianya petugas keamanan kantor UPTD	24,251,320	26,896,000			
	<b>02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur</b>	<b>31,555,000</b>	<b>34,200,000</b>			
	09. Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersediannya Fasilitas Gedung Kantor	0	587,000			
	11. Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat	Pengadaan Laptop (SIMDA Barang)	7,000,000	8,066,000			
	24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	12,725,000	13,183,000			
	26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	5,460,000	5,994,000			
	30. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6,370,000	6,370,000			
	<b>05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>	<b>7,550,000</b>	<b>7,780,000</b>			
	04. Peningkatan mental dan fisik aparatur	Terselenggaranya Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur	4,800,000	5,030,000			
	06. Pembinaan pengendalian dan pengawasan kepegawaian	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Kepegawaian	2,750,000	2,750,000			

	<b>06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Nilai LKJIP OPD</b>	<b>15,830,000</b>	<b>17,630,000</b>			
	01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan RKA/DPA dan RKAP/DPPA 2019	12,600,000	12,871,000			
	09. Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah	Tersedianya Informasi Pembangunan di UPTD	3,230,000	4,759,000			
	<b>07. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Manajemen Aset</b>	<b>18,250,000</b>	<b>18,250,000</b>			
	01. Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Teridentifikasinya dan terverifikasinya Asset UPTD	18,250,000	18,250,000			
	<b>22. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan</b>	<b>Pertumbuhan Populasi Ternak</b>	<b>316,270,000</b>	<b>633,576,000</b>			
	39. Pengembangan Pakan Lokal	Terlaksananya kegiatan pengembangan pakan olahan	316,270,000	633,576,000			
	<b>24. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan</b>	<b>Cakupan Kelompok Ternak Yang Memanfaatkan Teknologi Peternakan</b>	<b>191,007,000</b>	<b>201,404,665</b>			
	25. Pengembangan Pakan Hijauan Ternak dan Limbah Pertanian	Terlaksananya pengembangan pakan ternak dan limbah pertanian	30,225,000	43,698,999			
	26. Pengembangan Diklat Pengolahan Pakan Limbah Pertanian	Terlaksananya Diklat Pengolahan Pakan Limbah Pertanian	160,782,000	157,705,666			
<b>TOTAL DINAS PETERNAKAN DAN KESWAN</b>			<b>17,787,678,110</b>	<b>18,755,968,898</b>			

Program dan Kegiatan tahun 2019-2020 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB

## **BAB. V**

### **PENUTUP**

Keberhasilan Pembangunan Peternakan secara komprehensif akan sangat tergantung pada sejauh mana komitmen pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap lembaga legislatif, lembaga yudikatif, lembaga akademisi, swasta, dan masyarakat di Nusa Tenggara Barat itu sendiri. Oleh karena itu, dalam membangun suatu komitmen harus dimulai dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota sebagai basis pengembangan peternakan yang diikuti dengan penetapan kebijakan, perencanaan yang komprehensif dan terintegrasi, implementasi serta monitoring dan evaluasi program secara konsisten dan penuh tanggung jawab karena bagaimanapun pengembangan peternakan (Khususnya Industrialisasi Peternakan Ternak Sapi dan Unggas serta Industri Pakan Ternak ) sudah menjadi ikon Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat terutama dalam hal penyediaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan dan pendapatan peternak serta perbaikan mutu lingkungan.

Demikian Rencana Kerja (Renja) OPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 disusun sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan sehingga dapat memberikan manfaat dan dampak yang besar bagi masyarakat NTB.